BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam

Perkembangan zaman dewasa ini telah merubah standarisasi kehidupan manusia. Khususnya kehidupan manusia di kota-kota besar yang mulai berkembang menjadi modern banyak membawa pengaruh terhadap gaya hidup yang lebih maju, gaya hidup yang serba modern ini tidak diikuti dengan pengetahuan agama dan norma-norma yang ada didalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan masyarakat, seperti bergesernya nilai-nilai sosial yang ada didalam masyarakat yang dahulu sangat dihormati oleh masyarakat sekarang mulai perlahan pudar seiring dengan perkembangan zaman. Kemajuan teknologi, modernisasi, dan globalisasi yang dapat menyebabkan konflik yang sifatnya terbuka dan eksternal maupun yang tersembunyi dan internal sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat sesuatu semau sendiri demi kepentingan pribadi.

Salah satu bentuk penyimpangan norma atau penyakit masyarakat yang dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi. Prostitusi memiliki sejarah panjang dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di Dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Prostitusi merupakan perbuatan amoral yang terdapat dalam masyarakat. Prostitusi atau pelacuran adalah suatu praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa upah⁷⁸, tentunya prostitusi

bertentangan dengan tujuan dari seks yang dirancang oleh Tuhan untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹ Para pelakunya tidak hanya dari kalangan remaja dan anak dibawah umur saja, melainkan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga.²

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum dan juga berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama di mata hukum (asas *aquality be for the law*) dan pemerintahan. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai tombak untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Tujuan negara Indonesia sebagai Negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Di dalam ideologi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, sebagai suatu ideologi negara Indonesia bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religious yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk Negara.³ Perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi bangsa Indonesia, di dalam sila kedua di katakan

¹ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang, Dan Kekuasaan, (Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara)*, (Jakarta : LP3ES, 1992), hlm. 15

² Sri Esti Wuryani D, *Pendidikan Seks Keluarga*, Jakarta: Indeks, 2008, hlm. 262.

³ Kaelan. M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradikma, Yogyakarta, 2010. Hlm. 112.

bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” kita garis bawahi kata “beradab”. Melakukan Prostitusi dengan berkedok bisnis adalah merupakan kegiatan yang termasuk tidak beradab, jadi perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi negara.

Didalam perkembangannya banyak terjadi kasus-kasus yang ditemukan terkait dengan prostitusi terselubung. Berikut beberapa contoh kasus yang ditemukan seperti dikutip dari Kompas.com Sebuah rumah karaoke di Kepanjen Kidul, Kota Blitar, digerebek tim Polda Jatim karena membuka praktik prostitusi berkedok tempat karaoke. Penggebrekan tempat karaoke tersebut berdasarkan laporan warga yang di tindaklanjuti Unit III Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Dari penggebrekan itu polisi menangkap seorang mucikari berinisial “I.S”. Berdasarkan pemeriksaan sementara, IS memiliki lima anak buah yang bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke tersebut. Mereka menawarkan layanan prostitusi di dalam ruang karaoke dengan tarif dari Rp 800.000 hingga Rp 1 juta untuk sekali layanan. Tersangka I.S mendapatkan 30% dari tarif yang ditawarkan. Saat penggerebekan pada 10 Maret 2021, polisi menyita beberapa barang bukti di antaranya, alat kontrasepsi, celana dalam wanita dan laki-laki, bill room karaoke, dan uang tunai Rp 2.397.000. tersangka I.S dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman satu tahun empat bulan penjara.⁴ Selain itu contoh kasus lain yang terjadi adalah, sesuai dikutip dari CNN Indonesia, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan enam tersangka terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dengan membuka prostitusi di Venesia BSD Karaoke Executive, Serpong,

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/03/19/155129778/buka-praktik-prostitusi-di-tempat-karaoke-saat-ppkm-mikro-seorang-mucikari?page=all>

Tangerang Selatan, Banten. irektur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Ferdy Sambo mengungkapkan bahwa para tersangka itu berasal dari unsur mucikari dan manajemen tempat karaoke yang menjadi modus prostitusi tersebut. Dari kasus ini polisi menetapkan tiga mucikari dan tiga manajemen perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu para korban yang ikut digrebek sudah di tempatkan dibalai rehabilitasi. Kepolisian menemukan fakta bahwa mereka menyediakan jasa prostitusi dengan tarif Rp1,1 juta hingga Rp1,3 juta per vouchernya. Dalam penggerebekan itu, setidaknya ada 13 orang yang diamankan. Penangkapan itu dilakukan terhadap tujuh orang mucikari, tiga orang kasir, seorang supervisor, seorang manajer operasional, dan seorang general manajer. Dalam hal ini pun, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 14 baju kimono, voucher jasa prostitusi, uang Rp730 juta yang terkumpul sejak 1 Agustus 2020, dan 12 kotak alat kontrasepsi, hingga kuitansi hotel.⁵

A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Penyebab Terjadinya Prostitusi Di Tempat Hiburan Malam.

Metode praktek prostitusi dapat dibedakan menjadi dua menurut aktifitasnya, yakni prostitusi yang terdaftar dan terorganisir dan yang tidak terdaftar:

1. Prostitusi yang terdaftar biasanya si pelaku diawasi oleh bagian *Vice Control* yakni dari pihak Kepolisian, yang dibantu dan bekerjasama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dan diorganisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200821172958-12-537937/polisi-tetapkan-6-tersangka-kasus-prostitusi-karaoke-serpong>.

secara periodic harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan khusus serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum, agar terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang dapat menular dan membahayakan.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar, yang termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan, sembunyi-sembunyi dan liar, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak menentu bahkan dimanasa saja. Bisa disembarang tempat, baik mencari pelanggan sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri pada yang berwajib, sehingga dari segi kesehatannya sangat diragukan dan patut dipertanyakan, karena belum tentu diluar dari kegiatan mereka itu, mau memeriksakan diri kepada dokter.

Mengingat pelacuran ini merupakan bisnis gelap maka penyelesaian dan penanganan masalah ini semakin rumit, apalagi pelacuran merupakan bisnis perdagangan tanpa adanya barang yang diperdagangkan dan dilakukan di tempat tertutup sehingga untuk membuktikan telah terjadinya hal tersebut sangat sulit. Salah satu bentuk pelacuran yang sulit untuk diketahui kegiatannya secara real dan kasat mata adalah pelacuran tersebut yang berkedok tempat hiburan, salah satunya tempat Karaoke.

Berkembangnya tempat karaoke yang ada di Indonesia ini tidak luput dari perilaku menyimpang, pada dasarnya fungsi karaoke untuk hiburan yang bisa menghilangkan stress saat bekerja selain itu juga dimanfaatkan oleh pada keluarga

untuk berkumpul dan bersantai. Tetapi pada realitanya tidak sedikit oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan karaoke sebagai tempat pelacuran terselubung.

Ditempat-tempat pelacuran kebanyakan perempuan berusia 18-30 tahun yang merupakan masa dewasa awal. Menurut beberapa ahli mengatakan pada usia sekitar 18-30 tahun (masa dewasa awal) secara psikologis manusia memiliki tugas-tugas perkembangan seperti mulai bekerja, memilih pasangan, belajar hidup dengan tunangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga Negara, dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Perempuan muda pada masa dewasa awal mempunyai tugas perkembangan yang sangat tampak pada diri seorang PSK yaitu mulai bekerja. Faktor faktor yang melatarbelakangi seseorang mau menjadi pekerja seks komersial di tempat prostitusi adalah :

1. Faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi, terpaksa mereka menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

2. Faktor Kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

3. Faktor biologis atau seksual serta niat diri, adanya kebutuhan biologis yang besar yaitu kebutuhan seks yang tinggi, tidak puas akan pemenuhan kebutuhan seks. Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan.

4. Faktor Persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja

di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

5. Faktor pendidikan, karena tidak memiliki pendidikan dan inteligensi yang memadai sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat intelektualispun akan rendah, dengan demikian akan menimbulkan ketidakmampuan diri dalam mengikuti arus perkembangan sosial disegala bidang. Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.⁶

6. Faktor lingkungan keluarga, keluarga sebagai basis utama pendidikan moralitas individu akan memegang peranan penting dalam proses pendewasaan diri.

7. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan sulitnya memperoleh pendapatan yang memadai.

⁶ <http://eprints.umm.ac.id/36236/3/jiptumpp-gdl-verayuliar-47507-3-babii>. Akses, 5 agustus 2021

Dalam perkembangannya ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya prostitusi di tempat hiburan malam yaitu :

1. Faktor tempat.

Awalnya bisnis tempat hiburan malam seperti karaoke hanyalah tempat bisnis yang dipakai semata hanya untuk tempat hiburan namun ada beberapa oknum yang mempergunakan tempat tersebut untuk hal lain seperti tempat prostitusi terselubung dikarenakan tempatnya tertutup dan di pandang kebanyakan orang tempatnya bisa diterima keberadaanya dengan alasan ijin usaha bisnisnya hanya tempat hiburan malam.

2. Faktor bisnis atau komersil.

Saat pelacuran telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis pelacuran tersebut untuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis pelacuran, yang terjadi adalah bagaimana setiap pemain bisnis pelacuran dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya. Untuk bisnis pelacuran, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis pelacuran tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini para pebisnis yang bergelut dalam bisnis pelacuran cenderung mengambil jalan pintas dengan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memaksa atau melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk bekerja sebagai pelacur dalam bisnis pelacurannya. Mengingat pelacuran ini merupakan bisnis gelap maka penyelesaian dan

penanganan masalah ini semakin rumit, apalagi pelacuran merupakan bisnis perdagangan tanpa adanya barang yang diperdagangkan dan dilakukan di tempat tertutup sehingga untuk membuktikan telah terjadinya hal tersebut sangat sulit. Salah satu bentuk pelacuran yang sulit untuk diketahui kegiatannya secara real dan kasat mata adalah pelacuran terselebung yang berkedok tempat hiburan.

3. Pergeseran fungsi.

Berkembangnya tempat karaoke yang ada di Indonesia ini tidak luput dari perilaku menyimpang, pada dasarnya fungsi karaoke untuk hiburan yang bisa menghilangkan stress saat bekerja selain itu juga dimanfaatkan oleh pada keluarga untuk berkumpul dan bersantai. Tetapi pada realitanya tidak sedikit oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan karaoke sebagai tempat pelacuran terselebung. Dunia malam seperti karaoke dewasa yang karaoke itu beralih fungsi yang dulu mejadi tempat untuk berkumpul dan bernyayi, sekarang mengalami penggeseran fungsi, dimana tempat karaoke tersebut menjanjikan minuman dan wanita untuk menemani bernyayi. Dari hal tersebut banyak pengusaha menginfestasikan uangnya untuk membuat karaoke dewasa. Dengan rutintas yang sangat tinggi dan kesetressan semakin meningkat banyak orang mencari dunia hiburan.

4. Fasilitas.

Para penyedia layanan jasa tempat karaoke memberikan fasilitas room yang berlebihan dan ditemani wanita penghibur untuk menemani di saat berkaraoke. Wanita-wanita penghibur itu bukan hanya menemani bernyayi saja tetapi juga bisa di booking sesuai dengan keinginan pria hidung belang.

Prostitusi di Indonesia beranekaragaman dan mempunyai tingkatan-tingkatan operasionalnya.

1. Segmen kelas rendah.

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

2. Segmen kelas menengah.

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di booking semalaman.

3. Segmen kelas atas.

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

4. Segmen kelas tertinggi.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS (Wanita Tuna Susila) dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat

praktik prostitusi. Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung.⁷ Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebutkan karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja illegal, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari atau geromo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka. Keberadaan salon, panti pijat dan spa dengan layanan plus-plus ini sangat mudah ditemui. Pemilik usaha ini biasanya menempatkan papan nama dengan tulisan nama seorang perempuan atau nama tanaman hias sebagai tanda dari pada tempat usahanya tersebut. Biasanya hampir semua pemilik mengganti kaca depan tempat usahanya dengan warna yang gelap agar tidak mudah terlihat dari luar.

B. Pengaturan Prostitusi dalam Hukum Positif Indonesia

Untuk mengetahui apakah prostitusi merupakan suatu perbuatan pidana/Tindak Pidana, alangkah baiknya kita melihat bunyi dari Pasal 1 KUHP, isi Pasal 1 KUHP yaitu sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu.”⁸

⁷ <http://eprints.umm.ac.id/36236/3/jiptumpp-gdl-verayuliar-47507-3-babii.pdf>. Akses 5 Agustus 2021

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bandung: Karya Nusantara, 1981), hlm. 23.

Menurut Moeljanto bahwa asas legalitas itu mengandung³ (tiga) pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang boleh dihukum atau dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut tidak atau belumdinyatakan dalam suatu undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut;⁹

Dari isi Pasal 1 KUHP serta merujuk pada pendapat Moeljanto yang berpendapat bahwa unsur-unsur Tindak Pidana harus dilarang oleh undang-undang, maka dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Pengaturan prostitusi diatur dalam KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk-pembentuk undang-undang (badan legislatif negara) dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan dibidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 40

menjalankan kehidupan seksual mereka.¹⁰

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (Sex) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.¹¹ Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.¹² Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.⁶³ Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi

C. Upaya Penanggulangan Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan

Malam.

¹⁰ Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 1.

¹¹ Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 210

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 292

Prostitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat di Indonesia yang cenderung mengikuti gaya hidup masyarakat luar yang bebas. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya tempat-tempat hiburan malam yang berkembang menjadi tempat prostitusi terselubung.

Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia maka prostitusi bukan merupakan suatu tindak pidana. yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia karena yang dibahas dalam KUHP adalah perbuatan yang memudahkan terjadinya prostitusi dengan memberikan tempat sarana untuk melakukan prostitusi.

Berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya penertiban tetapi sampai sekarang masih banyak saja terjadinya praktek prostitusi. Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah pentingnya peran pemerintah membuat aturan dan lebih mengintensifkan pengawasan dalam mengawasi segala tindakan dan aktifitas yang dilakukan oleh tempat-tempat hiburan malam. Misalnya memanfaatkan keberadaan dari satuan pamong praja yang dimiliki oleh pemerintah Daerah. Keberadaan satuan pamong praja yang dimiliki oleh pemerintah daerah mempunyai arti yang cukup menonjol mengingat tugas-tugasnya membantu pemerintah daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada peningkatan kemajuan daerah. Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan satuan pamong praja daerahnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti :

1. Pemberantasan penyakit masyarakat dengan melakukan razia yang dilakukan langsung turun kelapangan secara intensif.

2. Menerbitkan surat izin usaha yaitu surat izin hiburan malam dan surat izin minuman beralkohol.
3. Melakukan pendataan dengan cara mendata identitas diri atau KTP
4. Jika mereka terbukti sebagai pekerja seks komersial maka harus diberi sanksi yang tegas sesuai aturan. Selain itu juga pemerintah daerah dapat melakukan peringatan yang keras atau ancaman akan dikeluarkan dari daerah kabupaten apabila masih terlibat dalam praktek-praktek sangat berpengaruh terhadap para PSK yang masih bebas berkeliaran bebas sehingga adanya tekanan dan mereka bisa meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pekerja seks.
5. Apabila kedapatan mereka ditangkap harus diberi bimbingan dan arah untuk bisa meninggalkan pekerjaan mereka yang ada dan beralih kepekerjaan yang baru yang lebih baik dan halal dan menguntungkan bagi diri sendiri dan masyarakat pada umumnya dan memberitahukan akibat dari profesi yang mereka geluti sangat berakibat fatal bagi perjalanan hidup dimasa depan.
6. Apabila terbukti membiarkan terjadinya prostitusi terselubung di tempat hiburan malam tersebut maka harus adanya sanksi yang tegas kepada pengelola berupa pencabutan izin usaha.

Selain dari pihak pemerintah daerah dalam hal penanganan praktik prostitusi juga bisa dilakukan oleh kepolisian. Polisi sebagai penegak hukum pada umumnya menegakan hukum dalam penanganan kasus prostitusi. Hal hal yang bisa dilakukan oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan prostitusi terselubung ini adalah :

1. Upaya secara preventif

Yaitu upaya-upaya dengan cara-cara pencegahan tindak pidana prostitusi, jadi upaya ini tekankan pada pencegahannya.

2. Upaya secara represif

Yaitu upaya-upaya dengan cara penindakan dengan tujuan untuk menekan, menghapus dan memberantas, serta usaha menyembuhkan para wanita tuna susila (WTS).

3. Melakukan patroli rutin dalam hal ini pemantauan secara langsung terhadap objek-objek yang diduga rawan dalam hal ini yang ditenggarai adanya praktek prostitusi terselubung.

4. Melakukan tindakan persuasif dengan meminta pengelola tempat hiburan malam atas laporan atau pengaduan serta indikasi adanya praktek prostitusi.

5. Apabila terjaring maka PSK yang terjaring harus didata dan dimintai keterangan yang jelas

6. Melakukan Pengusutan dan penindakan kepada pihak pengelola yang terbukti menyediakan tempat dan fasilitas.

Lembaga lain yang bisa dipakai sebagai upaya penanggulangan prostitusi terselubung dalah dinas sosial dan dinas kesehatan. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan himbauan kepada masyarakat baik bentuk sosialisasi maupun memberikan penyuluhan dan mengadakan program-program yang ditunjukan kepada PSK yang terjaring untuk melakukan serangkaian kegiatan fisik dan kesehatan.

Terakhir untuk upaya penanggulangan prostitusi terselubung adalah dari pihak masyarakat. Dengan kesadaran masyarakat terhadap masalah prostitusi akan

membuat penuntasan masalah penyakit masyarakat menjadi menurun. Penanaman nilai budi pekerti dan etika diperlukan untuk menambah kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya eksistensi dari nilai-nilai kesusilaan. Apabila dilihat dari undang-undang dalam upaya Berkaitan dengan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu¹³ : Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*)¹⁴ : 1. Sengaja 2. menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain 3. dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. R. Soesilo¹⁵ mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali). Selain itu adapun Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang

¹³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 119

¹⁴ Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 172-173.

¹⁵ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, hlm. 217.

dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi¹⁶: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” Namun Pada pasal tersebut, penekanannya terhadap unsur barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita. Jadi yang dihukum adalah orang yang mendapat keuntungan dari perbuatan cabul, bukan yang berbuat cabul (pelacur) Jadi karena kedua pasal tersebut di atas, tidak dapat dengan tegas melarang pelacuran atau dengan kata lain hukum pidana positif yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak melarangnya. Hal ini berarti gejala prostitusi, bukan merupakan kejahatan secara yuridis formal.

Prostitusi sebagai masalah sosial ssejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang dan selalu ada pada ssetiap tingkatan perradaban, perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan. Usaha ini sangat sulit melalui proses dan waktu yang sangat panjang, dan memerlukan biaya yang sangat besar. Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: usaha yang bersifat preventif serta tindakan yang bersifat represif dan kuratif. Usaha bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi. Kegiatan yang berupa usaha preventif antara lain:¹⁷

1. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi

¹⁶ Ibid. hal 200

¹⁷ Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm. 267

2. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan;

1. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya;
2. memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya;
3. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga;
4. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran prostitusi;
5. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks;
6. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya

Penanggulangan prostitusi secara preventif ini harus dilakukan oleh berbagai pihak baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat sehingga dapat berjalan maksimal. Kepala Daerah, DPRD, Satpol PP, dan pihak Kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan

tindakan seperti yang telah dijelaskan di atas untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi di wilayah mereka. Usaha represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas), dan usaha menyembuhkan para wanita PSK untuk kemudian membawa mereka ke kehidupan yang benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa:¹⁸

1. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para PSK serta lingkungannya;
2. Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang normal pada umumnya. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif;
3. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para PSK yang terkena razia; disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing orang;
4. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya;
5. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi PSK dan mau memulai hidup yang benar;

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm. 268

6. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga PSK dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas PSK itu untuk mengawali hidup baru yang benar;
7. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para PSK untuk membawa mereka kembali ke kehidupan yang benar;
8. Mengikutsertakan bekas PSK dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita

Prostitusi di Indonesia bukan hanya perkara jual-beli jasa seks secara nyata-nyata namun banyak model pelacuran yang dikembangkan dengan model terselubung. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), diharapkan penanganan terhadap terjadinya perdagangan orang akan semakin membaik. Pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara untuk menangani dampak dari masalah yang ditimbulkan oleh bisnis pelacuran tersebut khususnya perdagangan orang (trafficking), baik melalui kegiatankegiatan penyuluhan, seminar, pelatihan-pelatihan kerja dan yang terakhir adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang „Pemberantasan Perdagangan Orang“.¹⁹

Bisnis pelacuran semakin modern, bahkan jual-beli jasa seks kini juga hadir dalam dunia maya, yang mana pelakunya sangat sulit untuk diselidiki

¹⁹ https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/b5fb44f8a0edaa7e9932df550e-919d51. Akses, 5 agustus 2021

keberadaannya mengingat permainan yang dijalankan sangat rapi. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun UU ITE ini tidak bisa menghalau bisnis seks melalui internet, namun setidaknya kita telah punya aturan yang melarang hal tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya memang tidak seperti yang diharapkan.

Prostitusi sebagai masalah sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang dan selalu ada pada setiap tingkatan peradaban, perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan. Usaha ini sangat sulit melalui proses dan waktu yang sangat panjang, dan memerlukan biaya yang sangat besar. Kartini Kartono menjelaskan secara garis besar usaha untuk mengatasi masalah tunasusila atau prostitusi ini dapat dibagi menjadi dua.²⁰

1. Usaha yang bersifat preventif (pencegahan)

- a. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
- b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai- nilai religious dan norma kesusilaan.

²⁰ Karitni Kartono. *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*. (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm. 65.

- c. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya.
- d. Memperluas lapangan kerja bagi wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
- e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan berkeluarga.
- f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat local untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacur.
- g. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana- sarana lain yang merangsang nafsu seks.
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Penanggulangan prostitusi secara preventif ini harus dilakukan oleh berbagai pihak baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat sehingga dapat berjalan maksimal. Kepala Daerah, DPRD, Satpol PP dan pihak Kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan tindakan seperti yang telah dijelaskan di atas untuk mencegah terjadinya praktik prostitusi di wilayah mereka

2. Tindakan yang bersifat refresif dan kuratif, usaha yang dimaksudkan sebagai kegiatan menekan (menghapus, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untuk membawa kejalan yang benar. Usaha ini meliputi:

- a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi orang melakukan pengawasan/control yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya
- b. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila
- c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi parawanita tunasusila terkena razia, disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing
- d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tertentu untuk menjamin kesehatan pada prostitute dan lingkungannya
- e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila
- f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga dan masyarakat asal mereka mau menerima kembali bekas- bekas wanita tunasusila itu mengawali hidup
- g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi wanita

tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar

- h. Mengikutsertakan ex-WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi wanita.

Penanggulangan prostitusi secara represif dan kuratif ini dilakukan oleh dinas sosial sebagai akibat telah terjadinya prostitusi di wilayah tertentu dan ditindaknya pelaku prostitusi secara hukum. Hal tersebut dilakukan agar pelaku prostitusi tidak kembali melakukan praktik prostitusi sehingga dapat hidup secara normal dan sebagaimana mestinya kehidupan yang layak. Pengaturan larangan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.²¹

Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

D. Kelemahan-kelemahan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Prostitusi Terselubung.

1. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat

²¹ Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, hlm. 60

germo/mucikari/penyedia PSK saja, belum ada ketentuan untuk menjerat pelaku dan pemakai jasa PSK.

2. Ketentuan KUHP belum merumuskan secara jelas prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sementara secara faktual, hampir semua norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik itu norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan menolak perilaku prostitutif.
3. Ketentuan yang terdapat dalam KUHP belum ada aturan yang tegas dalam mengatur perilaku prostitutif, sehingga terjadi timpang tindih antara peraturan yang dengan yang lainnya.
4. Adanya pihak-pihak dari oknum penegak hukum yang diam-diam ikut terlibat dalam kegiatan prostitusi dengan cara meminta uang atensi dengan jaminan keamanan serta memberikan bocoran apabila akan dilakukan razia atau operasi terhadap tempat-tempat prostitusi berkedok tersebut.
5. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sekitar tempat-tempat usaha itu berada.

Konsep hukum pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi merupakan tugas DPR selaku perancang peraturan perundang-undangan dan pemerintah untuk mengusulkan RUU, sehingga untuk memberantas prostitusi terselubung diperlukan adanya aturan khusus yang mengatur secara tegas tentang larangan prostitusi dan pelacuran. Karena KUHP saja tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum dalam pemberantasan prostitusi, sehingga

dibutuhkan adanya aturan yang dituangkan dalam perda.

Perda yang diperlukan untuk memberantas prostitusi ini harus memuat beberapa hal, diantaranya:

1. Memuat ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi, baik penyedia tempat, pelaku prostitusi maupun pemakai jasa prostitusi tersebut.
2. Memuat ketentuan yang merumuskan secara jelas prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).
3. Memuat ketentuan yang mengatur secara tegas perilaku prostitutif, sehingga tidak terjadi timpang tindih dengan aturan yang lainnya.